



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. ENI ROHYANI, S.H., M. Hum
Jabatan : INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan, dalam rangka pemberian penghargaan dan pemberian sanksi.


Bandung, 27 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
GUBERNUR JAWA BARAT,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. ENI ROHYANI, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Jawa Barat	4,344 poin
2.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	A
3.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang daerah yang akuntabel dan sesuai standar akuntansi pemerintah	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat	WTP
4.	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mensosialisasikan dan membina penerepan SPIP di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik	Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
5.	Mengukur keberhasilan Inspektorat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai Indikator Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	98 persen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp57.851.852.773,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp29.360.799.211,00	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp4.729.725.972,00	APBD

Bandung, 27 Januari 2022

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

